

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan pendidikan di Indonesia pada umumnya mengalami perubahan baik dari segi tujuan, kurikulum maupun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Sistem manajemen pendidikan yang dilaksanakan pada masa orde baru masih bersifat sentralistis, artinya kerja pendidikan diatur secara memusat (dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil); kurikulum, metode ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, penilaian, ijazah, otoritas penyelenggarannya, dana, sasaran dan sebagainya (Mastuhu, 2004: 23).

Pendidikan dalam menghadapi masa depan yang semakin mengglobal, orientasinya harus memiliki berbagai perubahan-berubahan yaitu membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zamannya (Mastuhu, 2004: 67). Kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat direalisasikan melalui pendidikan yang dapat memberikan kebebasan dan kemerdekaan peserta didik, sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik (Muis, 2004: 4).

Pendidikan bukan hanya suatu upaya yang melahirkan proses pembelajaran yang bermaksud membawa manusia menjadi sosok yang potensial secara intelektual (*intellectual oriented*) melalui proses *transfer of knowledge* yang kental, tetapi proses tersebut juga memberikan nuansa yang

berupaya pada pembentukan masyarakat dan manusia yang berwatak, berakhlak, beretika, dan berestetika melalui proses *transfer of values* yang terkandung didalamnya (Arifin, 2000: 20).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam harus konsisten dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang menjadi acuan dalam setiap aktivitas kelebagaannya. Salah satu hal yang menarik dan menjadi kelebihan dari lembaga pendidikan madrasah dan sekaligus dapat membedakan antara bentuk pendidikan madrasah dengan bentuk sekolah lainnya adalah ciri-ciri komponen muatan belajar yang tidak bisa disubstitusi (digantikan) oleh lembaga lain, yaitu muatan pendidikan agama dan pendidikan perilaku sosial yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang Islami (Muslam, 2003: 54). Bahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 12 ayat (1), maka itu menjadikan suatu kelebihan bagi pendidikan madrasah karena memiliki daya tarik tersendiri bagi keluarga yang kurang sempat memberikan pendidikan agama kepada para putra putrinya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 10 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan juga menjelaskan bahwa MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya (Suparta, 2007: 146).

Madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional, diberi kewenangan untuk menambahkan pelajaran agama di dalam muatan kurikulum pelajaran

sesuai dengan corak dan kekhasan masing-masing, sehingga dengan kekhasan yang dimiliki, maka madrasah akan tetap menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam (Depag, 2001: 20). Berdasarkan hal tersebut diharapkan madrasah mampu *pertama*, menjadi wahana pembinaan ruh dan praktek hidup keislaman; *kedua*, memperkokoh sistem kelembagaan madrasah agar dapat sejajar bahkan lebih baik dengan sekolah umum; dan *ketiga*, madrasah dapat merespon tantangan masa depan (Depag, 2001: 32). Madrasah dengan ciri khas tersebut diharapkan dapat mempunyai perbedaan yang jelas dengan sekolah umum. Perbedaan itu tampak jelas bila dilihat dari melalui pengembangan kurikulum yang ditetapkan dari masing-masing lembaga pendidikan. Bergulirnya otonomi daerah sekaligus desentralisasi pendidikan, maka kurikulum pendidikan madrasah berusaha untuk mengintegrasikan diri dalam kebijakan pemerintah. Meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengikat mengenai posisi madrasah dalam rangka otonomi, namun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan bagaimana kurikulum madrasah akan selalu relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

Pengembangan kurikulum madrasah ke depan ditandai dengan berbagai ciri yang secara keseluruhan merupakan upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kurikulum sebelumnya. Di mana ciri tersebut yang perlu mendapat catatan penting adalah kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Ciri khas madrasah yang secara kurikuler hanya mendapat alokasi jam pelajaran yang terbatas melalui

lima mata pelajaran, dalam pelaksanaannya di lapangan sangat memungkinkan untuk ditambah dan diperkuat, lebih-lebih madrasah yang berada dilingkungan pesantren (Depag RI, 2001: 13).

Maka dengan pertimbangan tersebut lembaga pendidikan madrasah dapat menentukan corak dan isi dari kurikulum pengajarannya sebagai dokumen tertulis, serta kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai tujuan yang digariskan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan cita-cita dari lembaga pendidikan madrasah yang bersangkutan.

Perubahan dalam pengembangan kurikulum telah banyak dilakukan, diantaranya integrasi sistematis antar pendidikan dasar dan menengah dimulai tahun 1975, yaitu dengan diberlakukannya Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1975 (Kurikulum 1975). Pengembangan kurikulum ini menggunakan pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Kurikulum berikutnya yaitu Kurikulum 1984 dan Kurikulum 1994, menekankan pada orientasi akademik dan isi. Masyarakat mengkritik bahwa pada kedua kurikulum tersebut cenderung telah menghasilkan peserta didik yang hanya pandai menghafal. Kritik tersebut didukung hasil pengkajian para ahli kurikulum dan evaluasi kurikulum yang menyatakan bahwa kurikulum-kurikulum tersebut terlalu syarat materi sehingga guru cenderung mengejar pencapaian target kurikulum yang mengarah pada kemampuan kognitif, sedangkan kemampuan afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan. Pada tahun 2004 diberlakukan kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Pada tahun 2003 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1989. Tindak lanjut dari undang-undang tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bisa dimulai semenjak tahun ajaran 2006-2007.

Pada dasarnya KTSP adalah KBK yang disempurnakan, dengan memberi kelonggaran pengembangan pada institusi (sekolah/madrasah), sehingga roh yang digunakan sebagai pijakan adalah sama yaitu menekankan kepada aspek kompetensi. KTSP menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah untuk mengkaji dan memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta menerapkannya dalam pembelajaran. Demikian halnya pemerintah dituntut untuk memenuhi apa-apa yang telah ditetapkan dalam SNP. Jika tidak, maka perubahan itu hanya omong kosong saja; omong kosong tentang MBS, KBK dan KTSP sehingga nasibnya akan sama seperti keterampilan proses dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

Setiap perubahan kurikulum harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses dan hasil belajar peserta didik; bahkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik kepala sekolah, guru maupun

tenaga kependidikan lainnya, bahkan peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampaknya secara langsung oleh setiap perubahan kurikulum. Di samping itu, masyarakat, orang tua, pemakai lulusan, dan para birokrat, baik di pusat maupun di daerah akan terkena dampak dari perubahan kurikulum tersebut. Hal penting yang perlu ditekankan disini adalah apa yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya, serta siapa yang harus dilibatkan agar setiap perubahan kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dalam proses pembelajaran di sekolah (Mulyasa, 2009: 3).

Pengembangan kurikulum mengandung arti perubahan, pergantian (*alteration*), atau modifikasi terhadap susunan yang ada. Perubahan yang positif dapat menghasilkan pengembangan, karenanya ia harus memiliki karakteristik:

1. Perubahan harus bermanfaat, dalam arti bahwa perubahan harus sengaja dan mempunyai arah untuk mencapai target dan tujuan tertentu.
2. Perubahan harus direncanakan, dalam arti bahwa perubahan harus merupakan rangkaian langkah-langkah sistematis dan berurutan yang menuju ke target dan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
3. Perubahan harus progresif, dalam arti bahwa perubahan harus secara positif membawa perbaikan pada masa yang akan datang (Depag, 2005: 7).

Guru dan kepala sekolah dalam implementasi KTSP, dituntut untuk memperhatikan tiga komponen utama yaitu sebagai berikut: *pertama*, Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005, beserta penjabarannya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional (Permendiknas). *Kedua*, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dengan merumuskan secara jelas program pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran dan mekanisme serta kriteria penilaian. *Ketiga*, RPP perlu dikembangkan secara matang, untuk menentukan bahwa kegiatan pembelajaran sudah siap dilaksanakan (Mulyasa, 2009: 8).

Kegiatan pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah (MI), merupakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang cakupan kegiatannya cukup banyak dan kompleks. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak ditentukan oleh beberapa faktor saja, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah kegiatan *monitoring* dan *controlling* atau dengan kata lain pengawasan seluruh komponen dan aktivitas akademik adalah kegiatan yang sangat krusial, untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Pengawasan merupakan fungsi akademik dan fungsi administrasi yang tergolong pokok dan penting. Pengawasan juga merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pengawasan sering dimaknai dengan beberapa pengertian antara lain, pengontrolan (*controlling*), pengendalian, pengarahan, dan sebagainya. Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan atau dibakukan. (Departemen Agama RI, 2005: 31).

Pengawasan terhadap sekolah umum dan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah dan madrasah tersebut. Pengawasan tersebut lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengayoman bagi semua satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus-menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun mutu pelayanannya. Pengawasan atau supervisi dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan sekolah atau madrasah yang meliputi aspek edukatif dan administratif (Depag, 2004: 3).

Sebagai tenaga kependidikan, kedudukan pengawas sangat jelas dan tegas di lembaga pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan pada Bab I Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: "Anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan". Bab II Pasal 3 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: "terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji" (Amiruddin, 2006: 1).

Pengawas (*supervisor*) adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, kepala

sekolah, personil lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, nomor 118/1996 dan keputusan Menteri Agama, nomor 381 tahun 1999 dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan menengah (Amiruddin, 2006: 2).

Jika ditelaah berdasarkan peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Keputusan Menteri Agama tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan pengawas sangat strategis dan akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis itu akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Amiruddin, 2006: 2).

Peran pengawas itu vital atau sangat penting, karena pengawaslah yang menjadi ujung tombak penjamin mutu pendidikan. Sekalipun para guru telah dilatih mengenai kurikulum baru beserta pengembangannya, tidak menutup

kemungkinan di lapangan mereka akan mengalami kesulitan dan tantangan. Betapa pentingnya peran pengawas, karena pengawas diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan bahkan meningkatkan motivasi, kinerja dan semangat para guru agar tidak putus asa dan tetap bersemangat dalam mencoba menerapkan gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka di kelas termasuk dalam hal ini adalah berani mengembangkan kurikulum di madrasah.

Bertitik tolak dari uraian di atas, pengawas sebenarnya sangat dibutuhkan kinerjanya di lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh, namun sepertinya kinerja pengawas dalam hal fungsi dan perannya sampai saat ini masih belum memberikan kejelasan, terutama dalam hal pembinaan akademik dan administrasi khususnya pengembangan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI). Keraguan atas kinerja inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah tesis.

Hal yang menarik dari kajian ini adalah adanya fenomena yang tampak sekali di lembaga pendidikan bahwa antara pengawas dengan yang diawasi (guru) kinerjanya lebih baik yang diawasi, artinya guru justru lebih aktif dalam belajar dan mengajar, lebih kompeten dalam tugas dan tanggung jawabnya, tanpa harus dibimbing dan diarahkan oleh pengawas, bahkan ada kesan atau fenomena tentang kehadiran pengawas justru pada saat ia butuh, dan pada saat ketika acara-acara pokok yang notabennya ada uang hadirnya. Kebenaran asumsi dan fenomena ini seharusnya perlu dibuktikan oleh sebuah penelitian di lapangan untuk mengetahui kinerja pengawas yang sebenarnya.

Di Kabupaten Demak saat ini terdapat 17 orang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang bertugas membina para guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berjumlah 107 yang terdiri dari 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan 101 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). PPAI yang berjumlah 17 orang tersebut, hampir 50% nya adalah pengawas yang berusia 50 tahun ke atas atau mendekati masa purna tugas. Melihat jumlah kondisi PPAI dan jumlah madrasah ibtidaiyah, maka Kementerian Agama Kabupaten Demak masih banyak kekurangan tenaga PPAI.

Tesis ini meneliti, membahas dan menguraikan Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak, yang berjumlah 101 MIS, namun penulis hanya mengambil setting dua Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), yaitu: MIS. Matholiul Falah Buko Wedung Demak dan MIS. Miftahul Huda Bonangrejo Bonang Demak, sebagai fokus penelitian yang merupakan bagian penting dalam mencapai keberhasilan mutu madrasah dalam mengembangkan KTSP khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak. MIS. Matholiul Falah Buko Wedung Demak sebagai setting MIS yang mendapatkan pengawasan penuh dari PPAI. Madrasah ini selalu disupervisi baik supervisi akademik, supervisi administratif dan supervisi klinis, sehingga nampak betul hasil yang diperoleh dari supervisi tersebut. Jam datang dan pulang guru, kelas bernuansa PAKEM, administrasi kepala dan guru, KTSP, kegiatan belajar mengajar, suasana kondusif, hasil UASBN, nilai akreditasi dan kebersihan

serta lainnya adalah contoh kongkrit dari hasil pengawasan PPAI. MIS. Miftahul Huda Bonangrejo Bonang Demak adalah setting MIS yang kurang bahkan jarang mendapat pengawasan dari PPAI. Jam datang dan pulang guru yang kurang disiplin, kelas tidak bernuansa PAKEM, administrasi kepala dan guru yang ala kadarnya, KTSP yang kurang standar, kegiatan belajar mengajar kurang sesuai jadwal, suasana kurang kondusif, hasil UASBN kurang memuaskan, nilai akreditasi yang kurang maksimal dan kebersihan yang kurang terjaga serta lainnya adalah contoh kongkrit dari hasil kurangnya pengawasan PPAI. Subyek penelitian yaitu Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak yang berjumlah 17 orang, namun peneliti hanya mengambil setting dua pengawas, yaitu Abdul Hamid, S.Ag (Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Wedung Demak) dan Sugeng, S.Pd.I (Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bonang Demak). Berdasarkan setting tersebut, akan semakin memperjelas kontribusi PPAI dalam pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, yaitu:

1. Sejauh mana Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) memberikan kontribusi dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak melalui supervisi akademik?

2. Sejauh mana Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) memberikan kontribusi dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak melalui supervisi administratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian tesis ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan kontribusi supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.
2. Mendiskripsikan kontribusi supervisi administratif Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.

D. Signifikansi Penelitian

Mengacu pada penelitian tesis yang berjudul "Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak", penulis mengharapkan tesis ini akan:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam rangka meningkatkan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada umumnya dan PPAI MI di Kabupaten Demak pada khususnya.

2. Menambah wawasan ilmiah, motivasi dalam memfungsikan peran dan fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada umumnya dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Demak pada khususnya, serta dapat memberikan masukan bagi para pengembang KTSP di Madrasah Ibtidaiyah.

E. Tinjauan Pustaka

Tulisan dan penelitian lapangan yang secara khusus membahas uraian teoritik tentang “*Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak*”, menurut hemat peneliti belum ada, namun terdapat beberapa buku maupun penelitian yang terkait dan terdapat relevansi dengan penelitian ini. Tulisan dan penelitian tersebut antara lain :

Pertama, Amiruddin Siahaan dkk, dalam bukunya, “*Manajemen Pengawas Pendidikan*” penulis buku tersebut menjelaskan bahwa dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar, memiliki berbagai masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius, salah satunya adalah kepengawasan, pengawas pendidikan dalam konteks perubahan pendidikan adalah elemen yang dapat memberikan pencerahan yang bersifat komprehensif di lingkungan persekolahan. Kinerja pengawas, walaupun adakalanya bersifat teknis, tetapi memiliki kedudukan strategis dalam

menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja setiap elemen yang ada di sekolah (Amiruddin, 2006).

Kedua, Zaenal Aqib, "Membangun Profesional Guru dan Pengawas Sekolah". Penulis dalam bukunya tersebut menjelaskan adanya tuntutan membangun profesionalisme guru dan pengawas sekolah yang merupakan tuntutan semua aparat pendidikan ke arah yang lebih baik (Aqib dan Rohmanto, 2007).

Zaenal Aqib, *"Standar Pengawas Sekolah/Madrasah"*. Penulis buku tersebut menjelaskan tentang informasi, referensi, dan kebijakan terkini tentang pengawas yang dihimpun dari hasil workshop nasional pengawas sekolah/madrasah, AD/ART APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia), pedoman KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah), dan pedoman MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) (Aqib, 2009).

Ketiga, Oemar Hamalik, "Manajemen Pengembangan Kurikulum". Penulis buku tersebut menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, dimana bidang manajemen kurikulum pada hakikatnya mempersyaratkan kemampuan yakni: pemahaman tentang konsep-konsep dalam manajemen pengembangan kurikulum; proses manajemen pengembangan kurikulum; pelaksanaan kurikulum; pemantauan dan penilaian kurikulum; perbaikan kurikulum; dan ketenagaan dalam manajemen kurikulum (Hamalik, 2007).

Keempat, Mulyasa, "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)". Mulyasa dalam bukunya menjelaskan bahwa dia berupaya memformulasikan suatu cara praktis dalam mengimplementasikan

KTSP, sehingga dapat dijadikan panduan oleh para pelaksana di lapangan. Buku tersebut dilengkapi dengan contoh RPP , pelaksanaan pembelajaran dan strategi penilaian hasil belajar, juga dilengkapi dengan format dan model KTSP yang bisa dijadikan rujukan bagi guru, calon guru dan tenaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum pembelajaran.” (Mulyasa, 2009).

Kelima, Tesis saudara Saerozi yang berjudul ”*Studi Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Demak.*” (Saerozi, 2008) dalam tesisnya secara garis besar dapat disimpulkan bahwa para pengawas pendidikan agama Islam khususnya PPAI SD menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada *stakeholder* pendidikan. Pengawas PAI memberikan motivasi khususnya GPAI di Sekolah Dasar (SD) agar selalu disiplin bekerja dan meningkatkan mutu dan kualitas GPAI. Para PPAI selalu meningkatkan kompetensi agar dalam pembinaan kepada GPAI dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengawas PAI juga diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan supervisi pendidikan, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme GPAI demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Keenam, Tesis saudara Sitti Nur Afni Pasingi yang berjudul ”*Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum di SMA Kota Gorontalo.*” (Nur Afni, 2009) dalam tesisnya secara garis besar bahwa pengawas PAI sekolah umum di SMA Gorontalo telah menunjukkan fungsi dan peranannya sebagai nara sumber, fasilitator, motivator pengendali mutu pengajaran dan

penilaian. Pengawas PAI di SMA Gorontalo selalu melakukan pembinaan kepada guru PAI, misalnya melalui pemberian motivasi dan meningkatkan semangat kinerja guru khususnya kinerja GPAI. Pengawas PAI dalam tugasnya menghadapi permasalahan yang diantaranya penggunaan media guru yang belum maksimal, waktu yang tersedia sedikit sekali dan kurangnya kreatifitas GPAI. Berasumsi dari hal yang demikian maka PPAI Gorontalo berusaha mengoptimalkan forum MGMP, dan melakukan pembinaan kepada Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) khususnya penggunaan media pembelajaran yang variatif dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Ketujuh, Tesis saudara Sugianto yang berjudul "*Manajemen Pengawas dalam Pembinaan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam SMAN di Kabupaten Sumenep*" (Sugianto, 2009) dalam tesisnya secara garis besar dijelaskan bahwa pola manajemen PAI terdiri dari pengawasan agama, pengawasan akademik, pengawasan klinis dan pengawasan administratif, sedangkan pembinaan yang dilakukan PPAI dalam peningkatan profesionalisme guru PAI ialah pembinaan materi PAI, pendayagunaan sumber belajar, pengembangan peserta didik dan *classroom research (CAR)*.

Penulis dalam tesis ini memotret sisi lain dari tulisan tersebut yaitu "*Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.*" yang dilakukan secara obyektif dan jujur serta ada tindak lanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 20).

Pendekatan ini digunakan penulis dikarenakan subyek kajian penelitian tesis ini adalah kontribusi pengawas pendidikan agama Islam dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yakni dengan mendeskripsikan kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak dalam bentuk uraian narasi.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang tujuan utamanya dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya atau apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian tesis ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan.

Penelitian deskriptif memiliki beberapa hal yang dapat dideskripsikan pada hasil penelitian, yakni menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, ataupun menginterpretasi hasil kegiatan penelitian. Jenis

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang orang, instansi, lembaga, organisasi, unit-unit kemasyarakatan dan lain-lain, namun yang menjadi sumber utamanya adalah individu (orang).

Berdasarkan analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif interpretatif maka peneliti melakukan penelitian berdasarkan literatur kepustakaan dan observasi di lapangan, yaitu melalui observasi terhadap objek penelitian, sebagai metode yang utama. Hasil observasi dan wawancara dengan metode deskriptif interpretatif itu menggunakan analisis isi melalui data yang ada, kemudian menginterpretasi dan dideskripsikan secara lengkap.

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui wawancara (*interview*) dan observasi dari subyek (*informan*). Penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung dari para responden dalam hal ini pengawas pendidikan agama Islam, kepala madrasah, guru dan peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Data sekunder, pengambilan data dalam bentuk dokumen, catatan pengawas, buku monitoring, buku pembinaan, laporan bulan maupun laporan tahunan pengawas maupun tulisan baik di jurnal, artikel, majalah, koran, dan sebagainya yang erat hubungannya dengan fokus atau objek penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan penulis, berupa dokumen-

dokumen pengawas pendidikan agama Islam dan dokumen KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak yang erat kaitannya dengan tesis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Sugiyono, 2006: 262).

Wawancara ini ditujukan kepada:

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), tentang perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak.
2. Kepala madrasah tentang kebijakan terkait dengan pelaksanaan KTSP dan pengembangannya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten Demak.
3. Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) tentang peran pengawas dan pelaksanaan KTSP serta pengembangannya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kabupaten Demak.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian (Margono, 2000: 158). Jadi observasi adalah cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, yaitu pelaksanaan penerapan/implementasi KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 231). Penulis mengumpulkan data melalui berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) terhadap pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak. Dokumen yang dibutuhkan dari pengawas yakni diantaranya berupa program pengawasan, inventaris pengawas, catatan kunjungan pengawas, rincian program kegiatan yang telah terlaksana, kemudian hasilnya ini dituangkan dalam hasil penelitian.

Dengan penggunaan metode interview, observasi dan dokumentasi tersebut selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik interpretasi mengenai maknanya.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berpijak kepada pernyataan Miles & Haberman yang dikutip oleh Sugiyono, "Analisis kualitatif data diolah secara interaktif, melalui proses *data reduction, display and verification*." (Sugiyono, 2006: 276).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Pada tahap reduksi data peneliti menemukan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah mengumpulkan data, serta merangkumnya sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk melihat pada kontribusi pengawasan pengawas PAI, kegiatan para PPAI, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas PAI dengan kepala madrasah, guru, serta hasil pengawasan yang diaplikasikan oleh pengawas PAI dalam memberikan kontribusinya terhadap pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Display, pijakan atas teknik analisis data *display* memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2006: 341). *Display* data dilakukan setelah data direduksi dan disajikan secara naratif, terkait dengan aplikasi pengawasan PAI dalam pengembangan KTSP.

Verifikasi, sebagai teknik analisis data secara verifikatif hasil suatu penelitian dapat dikonfirmasi dengan penelitian lain, melalui cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Harapan utama dari metode ini data dapat diketahui bagaimana dan dalam situasi seperti apa suatu

strategi pengembangan KTSP di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dapat terwujud.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tesis ini dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing rinciannya adalah:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub antara lain: penulis mengemukakan latar belakang pemikiran dari penelitian ini dengan rumusan permasalahannya yang diangkat serta tujuan penelitian dikemukakan sedemikian rupa agar penelitian ini lebih terarah. Signifikansi penelitian merupakan bagian yang menguraikan kronologi berfikir dalam pencarian kebenaran tesis. Tinjauan pustaka dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan dari beberapa pustaka. Metode penelitian sebagai pijakan dasar dalam teknik pengumpulan, menganalisis, menyeleksi dan menyimpulkan data-data. Sistematika penelitian dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi antar bab dalam tesis. Secara umum bab pendahuluan ini dimaksudkan sebagai gambaran awal penelitian tesis.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum PPAI dan KTSP Madrasah Ibtidaiyah yang terdiri atas dua sub bahasan. *Pertama*, yakni Pengawas Pendidikan Agama Islam ; meliputi: pengertian PPAI , syarat PPAI, wewenang, peranan dan tanggung jawab pengawas; model pembinaan dan pelatihan pengawas; pengawasan akademik dan pengawasan administratif. *Kedua*, KTSP Madrasah Ibtidaiyah; meliputi: pengertian, tujuan pendidikan,

struktur kurikulum, muatan kurikulum, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, serta kenaikan kelas dan kelulusan.

Bab *ketiga* adalah kinerja PPAI dan Profil MIS di Kabupaten Demak, yang meliputi: *pertama*, situasi umum PPAI di Kabupaten Demak, yang berisi: letak geografis, keadaan pengawas, sarana dan prasarana. *Kedua*, Kinerja PPAI MI, yang berisi: Program kerja PPAI, dan pembinaan pengembangan KTSP MI. *Ketiga*: Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), berisi: keadaan siswa dan guru MIS, profil PPAI, dan profil MIS.

Bab *keempat* adalah kontribusi pengawasan akademik PPAI dalam pengembangan KTSP, yang meliputi: *pertama*, pengawasan akademik, meliputi: supervisi kurikulum, supervisi PBM, supervisi penilaian, dan supervisi kegiatan ekstra kurikuler. *Kedua*, kontribusi pengawasan akademik, berisi : Kontribusi pengawasan akademik di MIS Matholiul Falah Buko Kec. Wedung Kab. Demak, dan kontribusi pengawasan akademik di MIS Miftahul Huda Bonangrejo Kec. Bonang Kab. Demak.

Bab *Kelima*, kontribusi pengawasan administratif PPAI dalam pengembangan KTSP, meliputi: *pertama*, pengawasan administratif, meliputi: supervisi administrasi personal, supervisi administrasi material, dan supervisi administrasi operasional. *Kedua*, kontribusi pengawasan administratif, meliputi: kontribusi pengawasan administratif di MIS Matholiul Falah Buko Kec. Wedung Kab. Demak, dan Kontribusi pengawasan administratif di MIS Miftahul Huda Bonangrejo Kec. Bonang Kab. Demak.

Bab *keenam*, penulis mengemukakan bab penutup sebagai bab terakhir yang terdiri dari dua sub bab yaitu: sub bab pertama berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak. Sub bab kedua, berupa saran-saran, sub bab ketiga kalimat penutup.